PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHTAR**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **900366**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.745.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 393 m2/400 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 16190 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 1845 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah Seluas 1483 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 716 m2/320 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
6. Tanah Seluas 611 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 653 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 396.800.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4 X 2 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.300.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 86.800.000**

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	44.837.434
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	3.273.437.434
III.	HUTANG	Rp.	1.391.576.739
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.881.860.695

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.